

**KONGRES KEBUDAYAAN JAWA
DI YOGYAKARTA DAN SURAKARTA DALAM
MAJALAH *DJAWA* (1925-1940)**

Abyan Habib Baskoro*, Florentinus Galih Adi Utama

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma

Jl. STM Pembangunan, Mrican, Depok, Sleman

*Email: abyanbaskoro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang, proses, dan implementasi keputusan Kongres Budaya Jawa yang terselenggara di Yogyakarta (1924) dan Surakarta (1929). *Java Instituut* sebagai bagian dari politik etis menjadi organisasi penyelenggara Kongres Budaya Jawa yang mewadahi pengembangan kebudayaan masyarakat bumiputra, khususnya Jawa. Melalui metode sejarah dan menempatkan majalah *Djawa* sebagai sumber primer, ditemukan keputusan kongres di Yogyakarta yaitu pendirian Museum Sonobudoyo. Sementara itu, kongres di Surakarta menghasilkan wacana untuk mendirikan Fakultas Sastra di Batavia. Penelitian ini memberikan gambaran atas kesungguhan implementasi Politik Etis oleh pemerintah kolonial dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan bumiputra di Hindia Belanda.

Kata Kunci: Majalah *Djawa*, Politik Etis, Kongres Budaya Jawa, Fakultas Sastra, Museum Sonobudoyo

ABSTRACT

This study examines the background, process, and implementation of the decisions made during the Javanese Cultural Congress held in Yogyakarta (1924) and Surakarta (1929). The Java Instituut, as part of the ethical politics, served as the organization which organized the Javanese Cultural Congress, facilitating the development of indigenous culture, particularly Javanese culture. Employing historical methods and positioning the Djawa magazine as the primary source, this study reveals that Yogyakarta Congress led to the establishment of Sonobudoyo Museum. Meanwhile, the Surakarta Congress initiated a discourse on establishing a Faculty of Letters in Batavia. This study highlights the colonial government's commitment in implementing the Ethical Politics in fostering the indigenous education and culture in the Dutch East Indies.

Keywords: *Djawa Magazine, Ethical Politics, Javanese Cultural Congress, Faculty of Letters, Museum Sonobudoyo*

PENDAHULUAN

Kolonialisme Belanda memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi masyarakat bumiputra. Sistem *cultuurstelsel* adalah salah satu produk kolonial yang mendatangkan keuntungan besar sepihak dalam bidang pertanian dan perkebunan, meski dengan cara mengorbankan sumber daya yang dimiliki bumiputra. Melihat kondisi masyarakat bumiputra yang memprihatinkan, kebijakan Politik Etis dijalankan pada permulaan abad XX atas usulan seorang tokoh progresif, yaitu Van Deventer (Poesponegoro & Notosusanto, 2019:22). Harapannya, Politik Etis dapat mengubah kondisi masyarakat agar lebih maju secara intelektual. Namun dalam perjalanannya, menurut A. Daliman yang dikutip Agus Susilo dan Isbandiyah dalam buku *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*, pelaksanaan Politik Etis semata-mata untuk menghindari kritik tajam dari berbagai kalangan. Di saat yang bersamaan, Politik Etis juga berfungsi sebagai peredam perlawanan rakyat yang ditimbulkan dari berbagai penderitaan sebagai akibat dari praktik kolonialisme Belanda (Susilo & Isbandiyah, 2018:407).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Politik Etis adalah edukasi. Pada tahun 1903, tercatat sejumlah 245 sekolah negeri didirikan untuk anak-anak bumiputra secara umum dan beberapa sekolah khusus untuk anak-anak birokrat dan bangsawan. Di samping itu, terdapat sekolah yang mencetak kader pegawai pemerintah yaitu OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaaren*) yang berlokasi di Probolinggo, Magelang, dan Bandung. Sekolah pencetak calon guru juga telah berdiri di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo. Berikutnya terdapat sekolah kedokteran yang disebut STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) di Batavia (Poesponegoro & Notosusanto, 2019:28-29). STOVIA merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam sejarah kebangkitan nasionalisme Indonesia.

Aula STOVIA menjadi tempat kelahiran bagi organisasi pertama dari kalangan bumiputra yang terdidik, Budi Utomo. Organisasi yang dibentuk tanggal 20 Mei 1908 ini diinisiasi oleh para pelajar dari berbagai sekolah, antara lain Sekolah Pertanian dan Kehewanan di Bogor; Sekolah Pendidikan Guru Bumiputra di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo; HBS (*Hoogere Burgerschool*) Surabaya; dan OSVIA Magelang dan Probolinggo (Nagazumi & Simbolon, dalam Budiharja, 2004:32-33). Budi Utomo mengadakan kongresnya untuk pertama kali di Yogyakarta untuk menentukan struktur kepengurusan dan penetapan AD/ART. Namun para pelajar STOVIA yang menjadi pendiri Budi Utomo tidak menjabat dalam tubuh struktural, melainkan hanya sebagai anggota (Sudiyo, 1997:22). Organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh R. Soetomo tersebut mulanya berawal dari gagasan mengenai *studiefonds* (dana pendidikan). Gagasan yang muncul dari diskusi antara dr. Wahidin Sudirohusodo dengan R. Soetomo dan M. Soeradji inilah yang mengawali munculnya kesadaran masyarakat bumiputra agar memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, dengan harapan agar dapat melepaskan diri dari pengaruh kolonial (Budiharja, 2004:21).

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan sejarah digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi tahap penentuan topik, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, penafsiran, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013:69). Topik yang dipilih adalah Kongres Budaya Jawa yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Surakarta, dengan rentang waktu dari 1925 sampai 1940. Sumber primer didasarkan pada laporan kongres yang dimuat di majalah *Djawa*—sebuah media massa bentukan *Java Instituut*, yang didukung sumber pustaka dari berbagai buku dan artikel jurnal, serta artikel *website*. Proses verifikasi sumber

dilakukan dengan mencermati artikel-artikel di Majalah *Djawa* yang memuat laporan pelaksanaan dan hasil kongres dari kedua kota tersebut. Interpretasi atas temuan sumber-sumber dilakukan dengan mengomparasi fakta dengan sumber pustaka lain yang sejenis, lalu diakhiri dengan penyajian tulisan historis mengenai Kongres Budaya Jawa di Yogyakarta dan Surakarta dalam Majalah *Djawa* (1925-1940).

Untuk memahami *Java Instituut* sebagai organisasi yang berperan penting dalam pelaksanaan Kongres Budaya Jawa, peneliti melandasi riset ini dengan teori organisasi yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins. Menurutnya, terdapat tiga unsur penting dalam struktur organisasi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Dalam kompleksitas, merujuk pada perbedaan setiap posisi dalam hierarki, perbedaan spesialisasi, dan jarak geografis antar unit yang tersebar (Robbins, 1994:6). Kongres Budaya Jawa diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, sehingga spesialisasi setiap tokoh dalam organisasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang bertujuan untuk mengembangkan budaya Jawa.

PEMBAHASAN

Kongres Budaya Jawa di Yogyakarta 1924

Kongres Budaya Jawa diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 24-27 Desember 1924. Kongres ini dilindungi langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII sebagai Sultan Yogyakarta. Topik yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu: (1) nilai yang dimiliki oleh monumen-monumen Jawa Kuno bagi kebudayaan Jawa di masa kini dan masa depan; dan (2) cara agar budaya asli dapat lebih berkeadilan dalam pendidikan anak bangsa (Majalah *Djawa*, 1924:120). *Java Instituut* mengundang tokoh-tokoh yang memiliki kesesuaian latar belakang dengan setiap topik diskusi kongres.

Topik pertama dibahas antara lain oleh C.P. Schoemaeker—arsitek dan guru besar di *Technische Hoogeschool* Bandung (Schoemaeker, 1924); Dr. F. D. K. Bosch, Indolog dengan keahlian arkeologi dan sejarah Indonesia (BOSCH, Frederik David Kan, 2017); Ir. Henri Meclaine Pont yang ahli di bidang arsitek, memadukan gaya arsitektur Barat dengan Nusantara (Henri Maclaine Pont, Tak Seindah Karyanya, 2007). Pembahas dari golongan bumiputra diisi oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, seorang dokter sekaligus pemerhati pendidikan dan kebudayaan bumiputra (Sugito, 1998:50-51).

Selanjutnya, pada topik mengenai pendidikan bumiputra didiskusikan oleh beberapa tokoh sebagai berikut. Pertama, W. D. P. Corporaal adalah seorang direktur *Kweekschool* “Gunung Sari” di Bandung (Kolff, 1926). Kedua, J. Kats merupakan seorang ahli bahasa yang salah satu karyanya berjudul “Tjontoh-tjontoh Pertjakapan Bahasa Melajoe” (Kats, 1927). Berikutnya ada seorang pemuka agama sekaligus pendidik yang konsentrasinya pada pendidikan Jawa, yaitu Pastor Van Lith (Rosariyanto, 2009:150). Dari pembicara bumiputra terdapat Ki Hadjar Dewantara yang dikenal sebagai pendiri lembaga pendidikan “Taman Siswa”. Lalu ada seorang ahli bahasa dengan karyanya berjudul “Lekas Gampang: Kitab bagi Moerid-Moerid Sekolah Djawa Beladjar Bahasa Indonesia”, yakni M. Soeridiradja (Soeridiradja, 1948); dan terakhir adalah R. Sasrasoeganda, seorang ahli bahasa yang mengarang kamus bilingual bahasa Melayu dan Jawa (Sosrosoegondo, 1922).

Dari kongres ini, dibahas beberapa sub topik dari turunan dua topik utama, yakni monumen Jawa Kuno dan pendidikan bumiputra yang menjadi bahan perdebatan para pembicara. Di antaranya yaitu mengenai (1) kemunduran budaya Jawa; (2) pengembangan budaya; (3) spiritualisme, intelektualisme, dan materialisme; (4) monumen dan warisan budaya Jawa; (5) pengembangan bahasa, dan (6) pengembangan pendidikan. Diskusi dan perdebatan Kongres Budaya Jawa di

Yogyakarta tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan bagi anak-anak bumiputra harus mengutamakan budaya mereka sendiri, dan monumen Jawa Kuno masih mempunyai makna krusial untuk kehidupan masa kini dan mendatang. Begitu pula dengan wacana mengenai restorasi tidak hanya didasarkan pada perspektif budaya, melainkan tetap memperhatikan sisi arkeologis, historis, dan estetika (Majalah *Djawa*, 1925:204).

Pendidikan Tinggi Sastra Timur: Kongres Budaya Jawa di Surakarta 1929

Surakarta menjadi kota pelaksanaan Kongres Budaya Jawa berikutnya. Kongres ini dilaksanakan pada hari Jumat hingga Minggu pada tanggal 27-29 Desember 1929. Agenda diskusi dalam Kongres *Java Instituut* di Surakarta dimulai pada hari Sabtu 28 Desember 1929 yang dibuka oleh Ketua *Java Instituut*, Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat. Sesi perkenalan dan perdebatan dengan topik “Pendidikan Tinggi Sastra Timur” dimulai pukul 09.30 sampai 13.00. Kemudian perdebatan dilanjutkan keesokan harinya pada hari Minggu 29 Desember 1929 di Kepatihan Mangkunegaran pukul 10.00 (Majalah *Djawa*, 1930:5).

Terdapat tiga orang pembicara dari kalangan Eropa dalam kongres di Surakarta ini. Pembicara pertama adalah Dr. G. W. J. Drewes. Ia merupakan seorang ahli di bidang sastra dan bahasa Indonesia dan Jawa (Teeuw, 1994). Berikutnya ada Dr. S. J. Esser, yang merupakan seorang ahli bahasa sekaligus pegawai Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda sebagai peneliti bahasa di Sulawesi (Noorduyn, 1963). Orang Eropa ketiga yang menjadi pembicara adalah Leopold van Rijckevorsel. Ia dikenal sebagai ahli bahasa dan sejarah Jawa. Karyanya yang terkenal adalah gubahan “Babad Tanah Djawi” (Rijckevorsel, 2015) dan menulis karya sejarah yang berjudul “Kitab Riwayat Kepoelaoean Hindia Timur” (Rijckevorsel & Sadiran, 1929). Dari kalangan bumiputra, terdapat dua tokoh yang menjadi pembicara yaitu R. A. A. Soejana dan Mr. R. Hadi. Pertama, Soejana adalah seorang bumiputra yang duduk di kursi *Volksraad* dan pernah menjabat sebagai Bupati Pasuruan periode 1915-1927 (Poeze, 2008).

Dalam kongres di Surakarta, terjadi perdebatan mengenai sub-sub topik dari persoalan pokok mengenai pendidikan tinggi Sastra Timur, yaitu (1) pengembangan bahasa dan budaya lokal; (2) kurikulum dan pendekatan dalam pendidikan; (3) nilai-nilai spiritual dan budaya; (4) tenaga pendidik dan metode pendidikan; (5) tujuan pendidikan tinggi sastra; dan (6) dikotomi Barat dan Timur dalam konteks budaya Indonesia. Dari dinamika dalam kongres tersebut, Ketua *Java Instituut*, Dr. Hoesein Djajadiningrat memutuskan beberapa hal. Fakultas Sastra Timur perlu didirikan di negara ini sebagai pusat praktik studi budaya Hindia Belanda dan untuk merangsang perkembangan pendidikan masyarakat bumiputra. Kemudian, fakultas yang diwacanakan tersebut sebaiknya digabungkan dengan fakultas yang telah berdiri sebelumnya di Batavia ke dalam satu universitas. Berikutnya, studi-studi di fakultas ini tidak hanya berfokus pada pelajaran masa lalu, tetapi juga persoalan mutakhir, khususnya untuk memberikan pelatihan praktis untuk beragam profesi serta pengembangan spiritual dan budaya (Majalah *Djawa*, 1930:66-67).

Pendirian Museum Sonobudoyo di Yogyakarta 1924

Pada kongres yang terselenggara di Yogyakarta, terdapat dua topik utama yang menjadi bahan pembahasan, yaitu mengenai monumen Jawa Kuno dan pendidikan bumiputra. Terdapat sebuah laporan tentang peresmian Museum Sonobudoyo di Yogyakarta yang dimuat di Majalah *Djawa* tahun 1935 No. 3 (Majalah *Djawa*, 1935). Pembangunan Museum Sonobudoyo ini merupakan sebuah proyek besar. Dapat dilihat dari halaman-halaman awal laporan, tertulis berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan hingga peresmian yang diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 6-7 November 1935 di Pendopo Museum Sonobudoyo. Laporan tersebut memuat keterlibatan banyak

tokoh-tokoh dari *Java Instituut*, arsitek, kontraktor, dan para pejabat lainnya seperti pemimpin Kasultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Majalah *Djawa*, 1935:198-200). Namun dalam laporan tersebut, tidak ditemukan informasi biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan.

Dalam laporan pembukaan Museum Sonobudoyo, pidato sambutan yang tercatat adalah pidato dari Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Sultan Hamengku Buwana VIII, Mr. J. Beijleveld sebagai Gubernur Yogyakarta, dan P. A. Soerjaamidjaja sebagai perwakilan Kasunanan Surakarta. Ada alasan penting mengenai pemilihan hari pembukaan Museum Sonobudoyo, yaitu dalam pidato yang disampaikan Ketua *Java Instituut*, Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat. Tanggal 6 November 1935 adalah hari Rabu Wage, bertepatan dengan hari lahir Sultan HB VIII. Alasan hari peresmian ditentukan di hari Rabu Wage adalah karena Sultan HB VIII antusias dengan rencana pembangunan museum dan telah memberikan dukungan baik moral maupun praktis, sehingga pihak *Java Instituut* merasa hari kelahiran HB VIII perlu dimeriahkan dengan pembukaan museum (Majalah *Djawa*, 1935:203).

Dr. Bosch diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam kongres ini. Ia menceritakan beberapa alasan perlu didirikannya Museum Sonobudoyo. Selain merespons tuntutan dari hasil keputusan kongres, berdirinya Museum Sonobudoyo ini tidak lepas dari konteks perkembangan museum akan benda-benda purbakala yang telah diupayakan dalam 50 tahun terakhir. Ditemukan banyak patung dan benda-benda purbakala lainnya yang tercecer di halaman gedung-gedung dan rumah penduduk Yogyakarta. Dengan temuan tersebut maka dilakukan pengumpulan benda-benda purbakala oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Perhimpunan Arkeologi (*De Archaeologische Vereeniging*). Mereka mendapat lahan untuk menyimpan benda-benda purbakala tersebut di antara paviliun milik Residen Yogyakarta dan sebuah Gereja Protestan, yang tentu atas seizin residen (Majalah *Djawa*, 1935:210). Dengan adanya Perhimpunan Arkeologi sebelum berdirinya *Java Instituut* tersebut, menandakan bahwa telah muncul kesadaran mengenai pentingnya mengumpulkan benda-benda purbakala bernilai historis yang terpecah.

Kemudian Dr. Bosch menjelaskan fungsi dari eksistensi museum, yakni mengarah pada dua hal, yang ia sebut dengan arah ilmiah-estetis dan sosial (Majalah *Djawa*, 1935:221). Maksudnya, museum dapat berfungsi sebagai wadah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menyajikan keindahan benda peninggalan masa lalu. Selain itu, museum juga dapat berfungsi sebagai pelestari dan pengembang kebudayaan masyarakat bumiputra, khususnya dalam hal ini bagi orang Jawa.

Berikutnya, Ir. Th. Karsten memberikan ceramahnya kepada para partisipan acara pembukaan Museum Sonobudoyo. Sebagai orang yang ahli di bidang arsitektur, Ir. Th. Karsten menyoroti soal arsitektur yang digunakan untuk membangun Museum Sonobudoyo. Museum Sonobudoyo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda purbakala di tanah Hindia Belanda memiliki fungsi tambahan, yakni untuk melestarikan dan mempromosikan gaya arsitektur Jawa (Majalah *Djawa*, 1935:228). Dengan kata lain, Karsten tidak merancang bangunan Museum Sonobudoyo dengan gaya Barat semata, melainkan ada keseriusan untuk menyesuaikan budaya setempat sehingga dipilihlah gaya yang oleh Handinoto disebut dengan “gaya arsitektur Indis” (Handinoto dalam Ardiyanto, 2015:287), atau campuran gaya Eropa dan Indonesia yang dalam hal ini adalah gaya Jawa. Gaya arsitektur Barat yang saat itu sedang berkembang adalah *Art Deco*. Gaya tersebut berkembang pada tahun 1920-an hingga 1930-an dengan karakter utama berbentuk geometris yang cukup rumit, dinamis, dan futuristik (Menten dalam Nursanty, 2024:40).

Di samping itu, Karsten memberikan saran mengenai fungsi museum lebih lanjut, yaitu sebagai pemicu pengembangan pendidikan mengenai arsitektur tradisional. Ia mengharapkan adanya

pendidikan arsitektur tradisional tersebut diajarkan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (Majalah *Djawa*, 1935:228). Singkatnya, bagi Karsten arsitektur tradisional memiliki posisi yang krusial untuk dihargai, dilestarikan, dan dikembangkan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk memperkuat identitas budaya dan pembangunan.

Dalam struktur organisasi, terdapat unsur penting salah satunya yaitu kompleksitas. Kompleksitas mengacu pada posisi dalam hierarki, perbedaan spesialisasi, dan jarak geografis. Terkait hal ini, Karsten yang memiliki spesialisasi di bidang arsitektur menjadi satu unsur penting dalam *Java Instituut*. Peran Karsten yang memiliki keahlian dalam bidang arsitektur, sebagai bagian dari organisasi dapat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan *Java Instituut* yang dirancang dalam Kongres Budaya Jawa di Yogyakarta pada 1924.

Rancangan Pendirian Fakultas Sastra: Respons atas Kongres Budaya Jawa di Surakarta 1929

Dalam kongres yang diselenggarakan di Surakarta pada tahun 1929 dengan tema besar Pendidikan Tinggi Sastra di Hindia Belanda, pemerintah Belanda merespons tuntutan kongres tersebut dengan mengeluarkan putusan yang diterbitkan dalam Majalah *Djawa* pada tahun 1940 No. 4. Laporan tersebut merupakan hasil kajian I. J. Brugmans tentang cara-cara penyelenggaraan Fakultas Sastra di Batavia yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda melalui Keputusan Pemerintah tanggal 4 Maret 1939 Nomor 35 (Majalah *Djawa*, 1940:355).

Brugmans melihat adanya ketidakseimbangan rencana awal tentang pendirian Fakultas Sastra yang berbasis “Indosentris”. Justru masyarakat bumiputra bersifat dualistik, artinya mereka terpengaruh dengan kebudayaan Barat. Ia mengkhawatirkan lulusan sekolah ini nantinya tidak tertampung dalam pekerjaan, sebab dengan “Indosentris” tersebut mata kuliah yang diajarkan hanya berfokus pada unsur-unsur kebudayaan lokal tanpa adanya campur tangan unsur Barat (Majalah *Djawa*, 1940:357). Namun mengenai kritiknya terhadap pendidikan yang mulanya bersifat Indosentris menunjukkan bahwa ada usaha untuk membatasi ruang lingkup studi sehingga lulusan akan sulit untuk memenuhi kualifikasi pegawai pemerintah kolonial ke depannya.

Brugmans menilai, selain Fakultas Sastra, fakultas ilmu sosial juga perlu didirikan. Fakultas ini memuat pelajaran mengenai ilmu-ilmu sosial, ekonomi, dan budaya Hindia Belanda. Fakultas ilmu sosial dibutuhkan karena masih ada kekurangan para sarjana yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial, sehingga diharapkan dapat mencetak “Ahli-ahli Hindia Belanda” (Majalah *Djawa*, 1940:360). Selain untuk mencetak yang disebut sebagai “Ahli-ahli Hindia Belanda”, pendirian fakultas sosial ini juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintahan di bidang sosial (Majalah *Djawa*, 1940:362). Di samping itu, fakultas ilmu sosial dapat menjadi pilihan alternatif bagi calon mahasiswa yang tidak menghendaki belajar di Fakultas Sastra (Majalah *Djawa*, 1940:360).

Studi mengenai bahasa dan sastra Indonesia menjadi perhatian utama para ahli. Studi bahasa yang sebelumnya mewajibkan mahasiswa untuk mempelajari bahasa Sansekerta dan Arab, digantikan bahasa Melayu dan Jawa. Ada kekhawatiran dari Brugmans mengenai hal ini apabila tetap mempertahankan Sansekerta dan Arab pada tingkat awal, yakni akan menjauhkan mahasiswa dari budaya lokal. Oleh sebab itu, para ahli menyampaikan kepada Brugmans bahwa bahasa Melayu dan Jawa menjadi bahasa pokok yang diajarkan sejak tingkat awal, sementara studi bahasa Sansekerta dan Arab menjadi bahasa pilihan pada tingkat lanjut (Majalah *Djawa*, 1940:391).

Gagasan awal studi sejarah yang direncanakan tahun 1929 adalah berfokus mempelajari sejarah Hindia Belanda. Brugmans keberatan akan hal itu, sebab sejarah Barat tetap perlu dipelajari karena ada keterkaitan dengan masyarakat Hindia Belanda saat ini yang telah terpapar budaya Barat secara

signifikan (Majalah *Djawa*, 1940:397). Dari ide Brugmans tersebut dapat dilihat bahwa ia memiliki kesadaran soal cakupan ruang lingkup sejarah. Sebab, dengan memperluas spasial yang dipelajari, dapat berpotensi menambah kekayaan perspektif kajian sejarah. Di samping itu, rencananya para lulusan studi sejarah hanya dibatasi sebagai tenaga pengajar sejarah di sekolah. Brugmans berkata bahwa “nasib sosial sebagian besar dari mereka yang akan menyelesaikan studi sejarah di universitas di Batavia tersebut tidak akan menjadi sejarawan, melainkan menjadi guru sekolah menengah” (Majalah *Djawa*, 1940:397). Sederhananya, terlihat bahwa intensi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi tidak murni untuk meningkatkan intelektualitas masyarakat bumiputra.

Mengenai studi etnologi, awalnya etnologi tergabung dalam studi bahasa dan sastra Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Brugmans, studi etnologi pada akhirnya terpisah dari studi bahasa dan sastra Indonesia agar tidak membebani para mahasiswa yang konsentrasinya di bidang bahasa. Pemisahan ini juga dilakukan atas kebutuhan untuk mencetak etnolog di wilayah terluar Hindia Belanda, dengan harapan para lulusan tersebut telah mendapat ilmu etnologi yang lebih berkembang (Majalah *Djawa*, 1940:403). Adanya usulan untuk membuka program studi etnologi tersebut menandakan bahwa pemerintah kolonial berkepentingan sebatas untuk mengisi kekosongan pegawai pemerintah.

Berikutnya, siapa saja yang mendapat akses untuk mengajar telah dirumuskan berdasarkan Statuta Akademik (*Academisch Statuut*) Pasal 21. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan untuk orang yang berhak menjadi tenaga pengajar:

1. Para lulusan doktoral di bidang ilmu sosial berhak mengajar studi perencanaan negara dan administrasi publik.
2. Para lulusan doktoral di bidang bahasa dan sastra Indonesia berhak mengajar studi bahasa Jawa dan Melayu.
3. Para lulusan doktoral di bidang sejarah berhak mengajar di bidang ilmu sejarah, ilmu politik, dan ekonomi politik.
4. Para lulusan doktoral di bidang etnologi berhak mengajar pada studi ekonomi negara (Majalah *Djawa*, 1940:412).

Dapat dicermati dari uraian di atas bahwa golongan bumiputra akan kesulitan menjangkau peluang menjadi pengajar sebab kualifikasi yang begitu tinggi. Terlebih lagi para lulusan sarjana akan lebih memilih bekerja sebagai pegawai pemerintahan dan tampak bahwa memang diarahkan untuk itu.

Keseriusan pemerintah kolonial atas rencana pendirian Fakultas Sastra dalam memenuhi sarana dan prasarana fakultas tidak terlihat di sini. Hal tersebut bisa dilihat pada awal rencana pelaksanaannya yang memanfaatkan sisa ruang kelas fakultas hukum di Batavia. Disebutkan bahwa ruang kelas fakultas hukum memiliki empat ruang besar dan dua ruang kecil. Fakultas hukum telah memakai dua kelas kecil tersebut sehingga empat ruang besar dapat digunakan Fakultas Sastra (Majalah *Djawa*, 1940:420).

Sebuah lembaga pendidikan tinggi tidak lepas dengan fasilitas baca atau perpustakaan untuk dapat mengakses buku-buku dan bahan bacaan lainnya. Dalam laporan ini disebutkan mengenai ketiadaan ruangan perpustakaan yang memadai bagi para civitas akademika Fakultas Sastra. Hanya ada tersisa ruangan kecil di gedung museum yang tampaknya tidak cukup layak untuk memenuhi kebutuhan ini. Maka ada solusi sementara yang diusulkan, yaitu mengubah auditorium fakultas hukum menjadi ruang baca (Majalah *Djawa*, 1940:421-422).

Selain untuk mencetak para sarjana yang ahli di bidang bahasa, pembentukan Fakultas Sastra juga diharapkan dapat menghadirkan semacam lembaga bahasa yang mampu berkontribusi bagi khalayak luas di luar kampus. Harapannya, keberadaan fakultas tersebut dapat menjadi wadah untuk penelitian bahasa yang terkoordinasi dengan baik. Profesor yang ahli di bidang bahasa Jawa dan Melayu berpotensi menjabat sebagai direktur di kantor yang berada di bawah naungan lembaga Perhimpunan Batavia (*Bataviaasch Genootschap*) ini (Majalah *Djawa*, 1940:418).

Catatan-catatan Brugmans mengenai cara-cara penyelenggaraan Fakultas Sastra tersebut menandakan bahwa masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk dapat memenuhi standar pendirian Fakultas Sastra. Rentang waktu 10 tahun semenjak disepakatinya keputusan kongres di Surakarta pada 1929 tidak membuat pemerintah kolonial Belanda segera menindaklanjuti secara serius untuk mengembangkan pendidikan. Pendirian Fakultas Sastra sebagai salah satu bentuk pendidikan tinggi bukan merupakan prioritas pemerintah kolonial Belanda. Seperti yang diungkapkan oleh Robert van Niel, penerapan pendidikan oleh pemerintah kolonial hanya sebatas untuk tujuan utilitarian, yaitu pendidikan kolonial bukan ditujukan untuk pengembangan intelektual bumiputra, melainkan untuk menghasilkan pegawai rendahan bagi pemerintah kolonial (Niel, 1960:12).

KESIMPULAN

Majalah *Djawa* merupakan sebuah media yang menjadi corong informasi mengenai segala kegiatan yang dilakukan *Java Instituut*. Majalah berbahasa Belanda yang mulai terbit pada tahun 1921 ini menjadi wadah bagi para intelektual dan budayawan, baik dari kalangan Eropa maupun bumiputra, untuk menuangkan gagasan tentang kebudayaan dan pendidikan di Hindia Belanda. Penamaan Majalah *Djawa* dipilih atas dasar kebudayaan Jawa yang menjadi pokok pembahasan, tetapi tidak membatasi pembahasan mengenai budaya lain seperti Sunda, Tengger, Madura, Osing, dan Bali.

Pada awal berdirinya, *Java Instituut* bertujuan mengembangkan budaya Jawa khususnya, dan budaya-budaya lain di Hindia Belanda pada umumnya. *Java Instituut* yang diresmikan pada tahun 1919 ini merupakan hasil Kongres Budaya Jawa pertama yang diselenggarakan di Surakarta. Kesadaran untuk mengembangkan kebudayaan menjadi alasan penting dalam berdirinya organisasi ini. Kongres yang diselenggarakan *Java Instituut* pada waktu-waktu berikutnya juga menjadi arena bagi para Indolog dari kalangan Eropa dan bumiputra untuk berdialog membahas pengembangan kebudayaan Hindia Belanda—khususnya Jawa, termasuk kongres yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1924 dan 1929.

Kongres di Yogyakarta pada tahun 1924 membahas seputar monumen-monumen Jawa Kuno dan pendidikan bumiputra. Dalam kongres ini terjadi dialog mengenai perbedaan cara pandang mengenai pengetahuan Barat dan Timur. Ilmuwan Barat lebih mengedepankan intelektual sedangkan para ilmuwan Timur menggunakan pandangan mistisisme. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, para ahli yang berbicara dalam kongres tersebut memadukan kedua kutub pemikiran dengan tujuan agar komprehensif dan tidak berat sebelah.

Dari kongres yang terselenggara di Yogyakarta tersebut menghasilkan putusan untuk mendirikan sebuah monumen yang disebut Museum Sonobudoyo. Selain para Indolog dari *Java Instituut*, peranan Perhimpunan Arkeologi yang telah lahir sebelumnya menjadi penting untuk diketahui sehingga kesadaran mengenai pentingnya benda-benda masa lampau mendapatkan tempatnya. Di samping itu, peran elite Jawa tidak kalah pentingnya, lebih khusus Sri Sultan Hamengku Buwono VIII yang menghibahkan tanah di sebelah istana kasultanan sebagai lokasi Museum Sonobudoyo.

Pendidikan Tinggi Sastra Timur menjadi topik pembahasan kongres berikutnya di Surakarta pada 1929. Kongres ini menyinggung pentingnya pendidikan tingkat lanjut untuk studi bahasa dan sastra Indonesia. Sebab, kondisi pendidikan saat itu berfokus pada ilmu-ilmu praktis untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial, seperti bidang ilmu administrasi, ilmu hukum, dan kedokteran. Dari kongres ini dihasilkan sebuah keputusan untuk mendirikan Fakultas Sastra di Batavia.

Sebagai tindak lanjut dari kongres di Surakarta pada 1929, pemerintah kolonial Belanda membutuhkan waktu kurang-lebih 10 tahun untuk melakukan investigasi mengenai cara menyelenggarakan Fakultas Sastra. Dr. I. J. Brugmans menjadi delegasi pemerintah kolonial Belanda untuk menyelidiki hal ini dengan menemui para ahli dan melakukan kunjungan ke bangsa-bangsa Asia Tenggara lain. Dari saran para ahli, sebagian besar mengusulkan untuk menambah bidang studi lain seperti studi ilmu sosial dan etnologi. Penambahan studi di luar rencana awal yakni studi bahasa dan sastra Indonesia, membuktikan bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak memiliki kesungguhan dalam memajukan intelektual kaum bumiputra. Pendidikan formal diselenggarakan hanya sebatas mencetak kader-kader untuk memenuhi kebutuhan sebagai *ambtenaar* bagi pemerintah kolonial.

Tujuan *Java Instituut* untuk mengembangkan kebudayaan dan pendidikan di Hindia Belanda tampaknya tidak sesuai cita-cita awalnya. Usaha-usaha untuk kemajuan kedua hal tersebut sebatas menjadi bahan diskusi yang diselenggarakan oleh *Java Instituut*. Kehadiran mereka tidak secara langsung berpengaruh terhadap pengembangan kebudayaan dan pendidikan karena terhambat oleh kebijakan yang diputuskan pemerintah kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Surat Kabar

Majalah *Djawa*, 1924. Jaargang IV (2).

Majalah *Djawa*, 1925. Jaargang V (002-1).

Majalah *Djawa*, 1930. Jaargang X (1).

Majalah *Djawa*, 1935. Jaargang XV (3).

Majalah *Djawa*, 1940. Jaargang XX (4).

Buku

Ardiyanto, A. 2015. Thomas Karsten and the Java Traditional Architecture Development and Innovation. *The International Journal of Humanities and Social Studies*, 285-291.

Budiharja, Sulistya, A., Kurniawati, M., Budiharto, H., & Sukrilah, A. 2004. *Budi Utomo: Sejarah dan Kongres Pertama di Yogyakarta 1908, Sebuah Kajian Koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta*. Yogyakarta: Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Geertz, C. 1960. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press.

Kats, J. 1927. *Tjontoh-tjontoh Pertjakapan Bahasa Melajoe/J. Kats*. Weltevreden: A. Emmink.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Niel, R. V. 1960. *The Emergence of The Modern Indonesian Elite*. Bandung: W. Van Hoeve.

Noorduyn, J. 1963. Mededelingen uit de verslagen van Dr. S. J. Esser, taalambtenaar voor Celebes 1928-1944. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 329-370.
doi:<https://doi.org/10.1163/22134379-90002118>

- Nursanty, E. 2024. *Teori Perkembangan Arsitektur Modern Pasca Revolusi Industri*. Demak: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poeze, H. A. 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta.
- Rijckevorsel, L. V. 2015. *Babad Tanah Djawi*. Rembang: Kantor Perpustakaan dan Arsip.
- Rijckevorsel, L. V., J. S., & Sadiran, S. 1929. *Kitab Riwayat Kepoelaoean Hindia Timoer/dikarang oleh L. Van Rijckevorsel; dimelajoekan oleh J. Soejana dan S. Sadiran*. Weltevreden: J. B. Wolters.
- Robbins, S. P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. (J. Udaya, Trans.) Jakarta: Arcan.
- Rosariyanto, H. 2009. *Van Lith, Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, Sejarah 150 th Serikat Jesus di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Soeridiradja, M. 1948. *Lekas Gampang: Kitab bagi Moerid-Moerid Sekolah Djawa Beladjar Bahasa Indonesia*. Weltevreden: J. B. Wolters.
- Sosrosoegondo. 1922. *Baoesastra Melajoe-Djawa*. Weltevreden: Bale Poestaka.
- Sudiyo, Santono, D., Nugroho, A., & Suwardi, E. 1997. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugito. 1998. *Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Susilo, A., & Isbandiyah. 2018. Politik Etis dan Pengaruhnya bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal Historia*, 6(2), 403-415. doi:<http://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531>
- Teeuw, A. 1994. In Memoriam G. W. J. Drewes 28 November 1899 - 7 Juni 1992. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 27-49. Diambil kembali dari <http://www.jstor.org/stable/27864509>

Website

- BOSCH, Frederik David Kan*. 2017, Februari 6. Dipetik Juli 7, 2024, dari Person of Indian Studies by Prof. Dr. Klaus Karttunen: <https://whowaswho-indology.info/900/bosch-frederik-david-kan/>
- Henri Maclaine Pont, Tak Seindah Karyanya*. 2007, Mei 29. Dipetik Juli 7, 2024, dari www.itb.ac.id: <https://www.itb.ac.id/berita/henri-maclaine-pont-tak-seindah-karyanya/1660>
- Kolff, G. 1926. *Verslag van de kongresvergaderingen in 1926 gehouden op 21, 22 en 23 september te Jogjakarta*. Dipetik Juli 6, 2024, dari Delpher: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB31:027856000:00001>
- Schoemaeker, C. P. 1924, Oktober 2. *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie*. Dipetik Juli 6, 2024, dari Delpher: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000428032:mpeg21:p00002>